

**INDIKATOR KEURBANAN NAGARI DI KORIDOR JALAN NASIONAL
DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)*



LOLA FITRIA DARMA
2007 /89109

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI

**JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

ABSTRAK

Lola Fitria Dharma (2012); Indikator Keurbanan Nagari di Koridor Jalan Nasional di Kabupaten Dharmasraya. Padang: FIS UNP.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan indikator keurbanan nagari di Koridor Jalan Nasional di Kabupaten Dharmasraya

Jenis penelitian ini adalah deskriptif evaluatif, yaitu metode penelitian yang menjelaskan kondisi-kondisi yang ada dan membandingkan dengan kondisi idealnya (evaluatif). Populasi dalam penelitian ini adalah nagari-nagari di koridor jalan nasional di Kabupaten Dharmasraya, yaitu Nagari IV Koto Pulau Punjung, Nagari Gunung Selasih, Gunung Sungai Kambut, Nagari Sungai Dareh, Nagari Sikabau dan Nagari Tebingtinggi di Kecamatan Pulau Punjung, Nagari Gunung Medan di Kecamatan Sitiung, Nagari Koto Padang dan Nagari Koto Baru di Kecamatan Koto Baru serta Nagari Sungai Rumbai dan Nagari Sungai Rumbai Timur di Kecamatan Sungai Rumbai. Subjek penelitian yang merupakan orang yang ditunjuk sebagai informasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan dan memperoleh data dari lapangan setiap subjek penelitian yang diwawancarai adalah orang yang bisa mewakili setiap data yang diperlukan, subjek dalam penelitian, terdiri dari wali nagari dan petugas lapangan BPS.

Penelitian menemukan bahwa tingkat keurbanan nagari bervariasi. Sebagai berikut: 1) Kepadatan penduduk di Koridor Jalan Nasional Kabupaten Dharmasraya terbagi atas 2 bagian, yaitu: kepadatan penduduk < 500 jiwa/km, yang terdiri dari 8 nagari dan kepadatan penduduk 500 – 1249 jiwa/km² yang terdiri dari 3 nagari, 2) Rumah tangga non pertanian di Koridor Jalan Nasional Kabupaten Dharmasraya terbagi atas 6 bagian yaitu skor 1, skor 2, skor 3, skor 4, skor 5 dan skor 6 dan 3) Akses fasilitas umum nagari-nagari di koridor berkisar antara skor 2 dan 8. Berdasarkan indikator di atas maka dapat diklasifikasi daerah di Koridor Jalan Nasional Kabupaten yang termasuk kawasan pedesaan yaitu Nagari Gunung Selasih, Nagari Sikabau, Nagari Tebing Tinggi, Nagari Gunung Medan dan Nagari Koto Padang, serta kawasan perkotaan yaitu Nagari Sungai Kambut, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Sungai Dareh, Koto Baru, Sungai Rumbai dan Sungai Rumbai Timur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ucapan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Seiring dengan itu, penulis juga tidak lupa mengirimkan sholawat serta salam kepada arwah junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “**Indikator Keurbanan Nagari di Koridor Jalan Nasional di Kabupaten Dharmasraya**”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, banyak memperoleh bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP yang telah menyediakan fasilitas dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Dra. Yurni Suasti, M.Si selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Ahyuni, ST, M.Si selaku pembimbing II yang menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Wali Nagari di Kecamatan Dharmasraya yang berada di koridor Jalan Nasional
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai FIS UNP yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan.
6. Semua responden yang telah bersedia menyediakan waktu untuk di wawancarai
7. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bimbingan, bantuan, dan dorongan serta amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin

Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Padang, September 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR PETA	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Konseptual	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Populasi dan Subjek Penelitian	30
C. Data dan Teknik Pengumpulan Data	33
D. Instrumentasi	34
E. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Penelitian	37
B. Deskripsi Data	73
C. Pembahasan	114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel II.1	Fasilitas Pendidikan	23
Tabel II.2	Fasilitas Kesehatan.....	23
Tabel II.3	Fasilitas Perbelanjaan.....	24
Tabel II.4	Variabel/Klasifikasi, Skor dan Kriteria Desa 2000	26
Tabel III.1	Jenis data, Sumber data, Alat pengumpul data dan Teknik pengumpulan data.	34
Tabel III. 2	Kisi-Kisi Instumen Penelitian.....	35
Tabel III.3	Variabel/Klasifikasi, Skor dan Kriteria Desa 2000	36
Tabel IV.1	Wilayah Administratif Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Menurut Kecamatan Tahun 2012	39
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Nagari Gunung Selasih 2012	41
Tabel IV.3	Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan Formal di Nagari Gunung Selasih	42
Tabel IV.4	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Nagari Gunung Selasih 2012.....	42
Tabel IV.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Nagari Sungai Kambut 2012	44
Tabel IV.6	Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan Formal di Nagari Sungai Kambut.....	45
Tabel IV.7	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Nagari Sungai Kambut 2012	45
Tabel IV. 8	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	47
Tabel IV. 9	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Nagari IV Koto Pulau Punjung.....	48
Tabel IV. 10	Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan Formal di Nagari IV Koto Pulau Punjung.....	48
Tabel IV. 11	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	50
Tabel IV. 12	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Nagari Sungai Dareh	51
Tabel IV. 13	Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan Formal di Nagari Sungai Dareh.....	51
Tabel IV. 14	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	53
Tabel IV. 15	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Nagari Sikabau.....	54
Tabel IV. 16	Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan Formal di Nagari Sikabau.....	54
Tabel IV. 17	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Nagari Tebing Tinggi	56
Tabel IV. 18	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian Nagari Tebing Tinggi.....	57

Tabel IV. 19	Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan Formal di Nagari Tebing Tinggi.....	57
Tabel IV. 20	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Nagari Gunung Medan	59
Tabel IV. 21	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian Nagari Gunung Medan.....	60
Tabel IV. 22	Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan Formal Nagari Gunung Medan	60
Tabel IV. 23	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Nagari Koto Padang	62
Tabel IV.24	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Nagari Koto Padang.....	63
Tabel IV.25	Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan Formal di Nagari Koto Padang.....	63
Tabel IV.26	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Nagari Koto Baru.....	65
Tabel IV.27	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Nagari Koto Baru.....	66
Tabel IV.28	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Nagari Koto Baru.....	66
Tabel IV.29	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Sungai Rumbai	63
Tabel IV.30	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Kecamatan Sungai Rumbai	68
Tabel IV. 31	Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan Formal di Kecamatan Sungai Rumbai	68
Tabel IV. 32	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Sungai Rumbai Timur.....	71
Tabel IV. 33	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Kecamatan Sungai Rumbai Timur.....	72
Tabel IV. 34	Jumlah Penduduk, Luas Desa (Km ²), Kepadatan Penduduk, dan Skoring masing-masing Nagari di koridor jalan nasional Kabupaten Dharmasraya	72
Tabel IV. 35	Skor Persentase Rumah Tangga Non Pertanian masing-masing Nagari di koridor jalan nasional Kabupaten Dharmasraya	77
Tabel IV.36	Akses Fasilitas Umum di Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung.....	79
Tabel IV. 37	Skor Akses Fasilitas Umum di Nagari Gunung Selasih	80
Tabel IV. 38	Akses Fasilitas Umum di Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung.....	82
Tabel IV. 39	Skor Akses Fasilitas Umum di Nagari Sungai Kambut.....	83
Tabel IV. 40	Akses Fasilitas Umum di Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung	85
Tabel IV. 41	Skor Akses Fasilitas Umum di Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung	86
Tabel IV. 42	Akses Fasilitas Umum di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung.....	88

Tabel IV. 43	Skor Akses Fasilitas Umum di Nagari Sungai Dareh.....	89
Tabel IV. 44	Akses Fasilitas Umum di Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung	91
Tabel IV. 45	Skor Akses Fasilitas Umum di Nagari Sikabau	92
Tabel IV. 46	Akses Fasilitas Umum di Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung.....	94
Tabel IV.47	Skor Akses Fasilitas Umum di Nagari Tebing Tinggi.....	95
Tabel IV.48	Akses Fasilitas Umum di Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung	97
Tabel IV.49	Skor Akses Fasilitas Umum di Kanagarian Gunung Medan....	98
Tabel IV.50	Akses Fasilitas Umum di Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru	100
Tabel IV.51	Skor Akses Fasilitas Umum di Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru	101
Tabel IV.52	Skor Akses Fasilitas Umum di Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru	103
Tabel IV.53	Skor Akses Fasilitas Umum di Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru	104
Tabel IV. 54	Akses Fasilitas Umum di Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai	106
Tabel IV. 55	Skor Akses Fasilitas Umum di Nagari Sungai Rumbai TimurKecamatan Sungai Rumbai	107
Tabel IV. 56	Akses Fasilitas Umum di Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai	109
Tabel IV. 57	Skor Akses Fasilitas Umum di Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai	110
Tabel IV. 58	Skor Akses Fasilitas Umum di Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai	111
Tabel IV. 59	Kawasan Pedesaan pada Nagari-nagari di Koridor Jalan Nasional Kabupaten Dharmasraya.....	116
Tabel IV. 60	Kawasan Perkotaan pada Nagari-nagari di Koridor Jalan Nasional Kabupaten Dharmasraya.....	116

DAFTAR PETA

Peta		Halaman
Peta. 1	Peta Lokasi Penelitian	32
Peta. 2	Peta Administratif Kabupaten Dharmasraya	38
Peta. 3	Peta Kepadatan Penduduk Nagari sepanjang Koridor Jalan Nasional Kabupaten Dharmasraya	76
Peta. 4	Peta Akses Fasilitas Umum Nagari Gunung Selasih	81
Peta. 5	Peta Akses Fasilitas Umum Nagari Sungai Kambut.....	84
Peta. 6	Peta Akses Fasilitas Umum Nagari IV Koto Punjung	87
Peta. 7	Peta Akses Fasilitas Umum Nagari Sungai Dareh.....	90
Peta. 8	Peta Akses Fasilitas Umum Nagari Sikabau	93
Peta. 9	Peta Akses Fasilitas Umum Nagari Tebing Tinggi	96
Peta. 10	Peta Akses Fasilitas Umum Nagari Gunung Medan.....	99
Peta. 11	Peta Akses Fasilitas Umum Nagari Koto Padang	102
Peta. 12	Peta Akses Fasilitas Umum Nagari Koto Baru	105
Peta. 13	Peta Akses Fasilitas Umum Nagari Sungai Rumbai Timur	108
Peta. 14	Peta Akses Fasilitas Umum Nagari Sungai Rumbai.....	111
Peta. 15	Peta Wilayah Kota dan Desa Nagari Sepanjang Koridor Jalan Nasional Kabupaten Dharmasraya	113

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran .1 Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi yang ada di suatu wilayah adalah upaya untuk mengetahui potensi dan sektor yang dapat dipacu dan dikembangkan dalam proses pembangunan, dengan penilaian potensi yang tepat dan akurat akan terjadi efisiensi tindakan dalam proses pembangunan yang dilaksanakan, dengan usaha yang minimum akan diperoleh hasil yang optimum yang kesemuanya itu bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kemakmuran bagi masyarakat (Permen PU No 20; 2007). Potensi sosial ekonomi merupakan seluruh potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan dalam bidang sosial ekonomi mencakup potensi kependudukan, mata pencaharian, dan akses fasilitas umum. (BPS, 2008).

Kota ditinjau dari segi yuridis administratif dapat diartikan sebagai suatu daerah tertentu dalam wilayah dimana keberadaannya diatur oleh undang-undang (peraturan tertentu), dibatasi oleh batas administrasi tertentu, berstatus sebagai kota (kota kecil, kota madya, kota besar), berpemerintahan tertentu dengan segala hak dan kewajibannya mengatur wilayahnya. Dengan demikian, semua daerah yang berada dalam batas tersebut adalah kota walaupun di beberapa bagian wilayah kota tersebut terlihat kenampakan-kenampakan pedesaan (misalnya penggunaan tanah agraris) dan sebaliknya semua daerah diluar batas-batas tersebut adalah bukan kota, walau kenyataannya diluar batas-batas tersebut terdapat kenampakan-kenampakan kota. (Yunus dalam Bakar dan Suasti, 1994:5).

Sementara itu, ditinjau dari segi *morfological*, yaitu kenampakan-kenampakan tertentu yang mempunyai ciri khas fisik suatu kota. Dari matra ini, maksud dari kota adalah suatu daerah tertentu dengan karakteristik: 1) tata guna lahan non agraris, tata guna lahan mana maupun *residential* (secara umum, *building coverage*, lebih banyak dari pada *vegetation coverage*, 2) kepadatan rumah tinggi, 3) pola jaringan jalan yang kompleks, dalam satuan yang kompak dan relatif lebih besar dari pada satuan-satuan pemukiman disekitarnya. Sementara itu daerah yang bersangkutan mulai terjamah fasilitas kota yang ada. (Yunus dalam Bakar dan Suasti, 1994:5)

Urbanisasi sesungguhnya bermakna sebagai tingkat keurbanan (kekotaan) dalam suatu negara atau wilayah (*region*). Dalam sisi lain urbanisasi juga mengandung makna proses perubahan, yaitu perubahan dari bersifat pedesaan (*rural*) menjadi perkotaan (*urban*). Ukuran tingkat keurbanan, biasanya dalam konteks kependudukan yaitu dengan memproporsikan antara jumlah penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk nasional. Tetapi masalah urbanisasi tidak harus diinterpretasikan dalam konteks kependudukan semata, kenyataannya harus mencakup dimensi perkembangan dan kondisi sosial, ekonomi masyarakat, bahkan lebih jauh mencakup pula aspek budaya dan politik. Pada intinya dalam aspek kegiatan ekonomi, pengertian urbanisasi merupakan substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosio ekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa (<http://colorfulpragency.blogspot.com/diakses> tanggal 31 Januari 2012).

Urbanisasi dari segi keberadaan kota secara individu. Pengertian urbanisasi dalam hal ini dapat meliputi dua proses yaitu pergerakan horizontal penduduk berupa mengalirnya atau perpindahan penduduk dari desa ke kota (pengertian yang bersifat umum).

Selanjutnya urbanisasi dapat diartikan sebagai gerakan/horizontal keruangan atau disebut juga pemekaran kota secara alami/urbanisasi extension. Urbanisasi sebagai gerakan horizontal keruangan pengertiannya adalah berupa perubahan-perubahan dengan fungsi dan kualitas dari pola keruangan dan pola kehidupan masyarakatnya, dalam hal ini sehingga daerah yang semula secara fisik menggambarkan daerah perdesaan, kemudian berubah fungsinya menjadi daerah perkotaan,

Di Indonesia, pada umumnya kota merupakan hasil perkembangan dari desa. Di dalam suatu kota dimungkinkan untuk adanya suatu interaksi pada lingkungan yang beraneka ragam (Warlina dalam Koestoer, et al,2001). Keanekaragaman disini merupakan aktivitas yang dilakukan masyarakat kota pada setiap harinya, seperti bekerja, bersosialisasi, dan sebagainya, akan berdampak pada penentuan besar kecilnya ukuran sosial kota, disamping luas area dan jumlah penduduk. Aktivitas penduduk yang semakin beragam, intens, dan berkesinambungan antara aktivitas yang satu dengan yang lainnya dalam satu waktu menandakan bahwa suatu kota dapat dikatakan besar (metropolitan). Sedangkan kebalikannya ialah jika suatu kota tidak memiliki aktivitas yang padat dan sedikit keanekaragamannya, maka kota ini dapat dikatakan kota kecil (*infant town*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan kriteria kawasan kota sebagai berikut: 1) Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 2) Kawasan perkotaan baru adalah kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan dan 3) Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Menurut Daikonson dalam Sudaryo (1988;157) kota adalah suatu pemukiman yang bangunan rumahnya rapat dan penduduknya bernafkah bukan dari pertanian. Sedangkan menurut Bintarto (1989) menyatakan bahwa kota adalah sebagai suatu sistim jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan unsur-unsur alami dan nonalami serta kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibanding daerah dibelakangnya. Jadi kota adalah suatu tempat dengan konsentrasi penduduk yang padat mempunyai strata sosial ekonomi, sosial budaya yang heterogen yang menjadi pusat kegiatan manusia. Kawasan perkotaan (urban) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan jumlah penduduk: 1) 1. Kota kecil penduduknya 20000-50000 jiwa, 2) Kota sedang penduduknya 50000-100000

jiwa, 3) Kota besar penduduknya 100000-1000000 jiwa, 4) Metropolitan penduduknya 1000000-5000000 jiwa dan 5) Megapolitan penduduknya > 5000000 jiwa.

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatera Barat, dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004. Dharmasraya mempunyai 11 kecamatan yaitu, kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan IX Koto, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang laweh, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Asam Jujuhan.

Seiring dengan pemekaran Kabupaten Dharmasraya ditetapkan pula Kecamatan Pulau Punjung menjadi ibu kota Kabupaten Dharmasraya. Dengan ditetapkannya Pulau Punjung menjadi ibukota Kabupaten, pusat pemerintahan dan perkantoran terdapat di Kecamatan Pulau punjung. Kecamatan Pulau Punjung pun berkembang menjadi pusat kota di Kabupaten Dharmasraya. Sementara itu jumlah penduduk yang paling banyak berdomisili di Kecamatan Koto Baru, Sitiung dan Kecamatan Sungai Rumbai. Dari 11 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Dharmasyara, 4 Kecamatan inilah yang mengalami perkembangan yang pesat sebagai kawasan perkotaan.

Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan apakah seluruh wilayah atau kanagarian pada kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan

Koto Baru, dan Kecamatan Sungai Rumbai merupakan kawasan perkotaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Indikator Keurbanan Nagari-nagari di Koridor Jalan Nasional di Kabupaten Dharmasraya”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang ditemukan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana akses fasilitas umum nagari-nagari di koridor jalan nasional di Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimanakah tingkat pendidikan masyarakat nagari-nagari di koridor jalan nasional di Kabupaten Dharmasraya?
3. Bagaimanakah kepadatan penduduk nagari-nagari di koridor jalan nasional di Kabupaten Dharmasraya?
4. Bagaimana persentase rumah tangga pertanian nagari-nagari di koridor jalan nasional di Kabupaten Dharmasraya?
5. Bagaimanakah tingkat pendapatan penduduk nagari-nagari di koridor jalan nasional di Kabupaten Dharmasraya?
6. Bagaimanakah indikator keurbanan nagari-nagari di koridor jalan nasional di Kabupaten Dharmasraya?

C. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah identifikasi potensi sosial ekonomi penduduk untuk menentukan tingkat keurbanan nagari-nagari di koridor jalan nasional di Kabupaten Dharmasraya dilihat dari: 1) Kepadatan penduduk, 2) persentase rumah tangga nonpertanian, 3) akses fasilitas umum dan 4) indikator keurbanan setiap nagari di Kabupaten Dharmasraya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana tingkat keurbanan nagari-nagari di koridor jalan nasional di Kabupaten Dharmasraya dilihat dari 1) Kepadatan penduduk, 2) persentase rumah tangga nonpertanian, 3) akses fasilitas umum dan 4) indikator keurbanan.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan:

1. Tingkat kepadatan penduduk nagari di koridor jalan nasional di Kabupaten Dharmasraya.
2. Persentase rumah tangga nonpertanian nagari di koridor jalan nasional di Kabupaten Dharmasraya.
3. Akses fasilitas umum nagari di koridor jalan nasional di Kabupaten Dharmasraya.

4. Indikator keurbanan nagari di koridor jalan nasional di Kabupaten Dharmasraya.

F. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang penentuan tingkat keurbanan di Kabupaten Dharmasraya
3. Sumbangan informasi bagi pemerintah dan terkait untuk mengetahui tingkat keurbanan di Kabupetan Dharmasraya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab IV dapat diambil kesimpulan tentang tingkat pendidikan berdasarkan aksesibilitas daerah sebagai berikut:

1. Kepadatan penduduk di Koridor Jalan Nasional Kabupaten Dharmasraya terbagi atas 2 bagian, yaitu: kepadatan penduduk < 500 jiwa/km, yang terdiri dari 8 nagari dan kepadatan penduduk $500 - 1249$ jiwa/km² yang terdiri dari 3 nagari,
2. Rumah tangga non pertanian di Koridor Jalan Nasional Kabupaten Dharmasraya terbagi atas 6 bagian yaitu skor 1, skor 2, skor 3, skor 4, skor 5 dan skor 6.
3. Akses fasilitas umum nagari-nagari di koridor berkisar antara skor 2 dan 8. Akses fasilitas umumnya menunjukkan kawasan pedesaan dan akses tinggi menunjukkan kawasan perkotaan
4. Klasifikasi daerah di Koridor Jalan Nasional Kabupaten Dharmasraya terbagi atas 2 bagian yaitu kawasan pedesaan terdiri dari 5 nagari: Gunung Selasih, Sikabau, Tebing Tinggi, Gunung Medan dan Koto Padang, serta kawasan perkotaan yang terdiri dari 6 nagari yaitu Nagari Sungai Kambut, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Sungai Dareh, Koto Baru, Sungai Rumbai dan Sungai Rumbai Timur.

B. Saran

1. Bagi pemerintah nagari yang ada di Koridor Jalan Nasional Kabupaten Dharmasraya untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing sesuai dengan klasifikasi kawasan.
2. Bagi pemerintah kabupaten Dharmasraya untuk meningkatkan intensitas pembangunan ke arah kawasan pedesaan di Koridor Jalan Nasional Kabupaten Dharmasraya sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bakarudin dan Yurni Suasti.(2006). *Geografi Desa Kota*. Padang: UNP
- Bintarto, R. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bintarto, 1991. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3ES
- BPS, 2008. Kriteria Desa 20001
- Daljoneni.(2003). *Geografi Kota Desa*. Bandung: PT. Alumni
- Hermon, Dedi dan Triyatno. 2008. *Metode dan Teknik Penelitian Geografi Tanah*. Yayasan Jihadul Khair Center : Padang
- Mantra, Ida Bagus, 2009. *Demografi Umum*. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Nawi, Khairani. 2009. *Panduan Penyusunan Proposal Penelitian dengan Mudah*. Yayasan Jihadul Khair Center : Padang
- Peraturan Menteri PU No. 20;2007. *Pedoman Teknis Aspek Fisik Dan Lingkungan Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Menyusun Rencana Tata Ruang*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 Tahun 2008 tentang *Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan*
- Saputra, Hendra. 2011, *Dinamika Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Sensus Penduduk*. Skripsi, FIS UNP
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2007. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Tim penyusun. 2002. *Bahan Ajar Pengantar Pendidikan*. Universitas Negeri Padang
- (<http://colorfulpragency.blogspot.com/diakses> tanggal 31 Januari 2012).
- (Teneko, <http://arkandien.blogspot.com>), diakses tanggal 31 Januari 2012
- <http://arkandien.blogspot.com>
- Firman, <http://odexyundo.blogspot.com/diakses> tanggal 31 Januari 2012).
- <http://koestoer.wordpress.com/lingkungan>, diakses tanggal 31 Januari 2012
- http://sudaryo.wordpress.com/pengertian_kota, diakses tanggal 31 Januari 2012